

ISBN : 978-602-17593-0-1

PROSIDING

PROSIDING

Seminar Nasional Krisis Lingkungan Hidup Indonesia

Bogor, 15 September 2012

**SUMBERDAYA ALAM
UNTUK MASYARAKAT INDONESIA
SECARA ADIL DAN BERKEMAKMURAN**

PROSIDING



PS. PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN MENJAWAB TANTANGAN KRISIS LINGKUNGAN DI INDONESIA¹⁾

WIDIATMAKA²⁾

¹⁾Disampaikan pada Seminar Nasional Krisis Lingkungan Hidup Indonesia dan Kongres I Himpunan Alumni Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 15 September 2012

²⁾Staf Pengajar, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB dan Sekretaris Program Doktor, PS Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, IPB

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses panjang untuk melakukan internalisasi konsep dan jiwa dari tujuan pendidikannya sendiri. Dewasa ini, pendidikan di Indonesia menemukan momentum dengan telah diterapkannya dukungan pendanaan yang cukup berdasarkan Undang-undang Dasar yang mengharuskan alokasi minimal 20 persen anggaran negara. Di kalangan Perguruan Tinggi, momentum ini juga ditemukan dengan diterapkannya UU Pendidikan Tinggi yang telah disahkan baru-baru ini, meskipun ada berbagai kontroversi terhadap UU itu sendiri. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, momentum ini perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pendidikan –termasuk pendidikan lingkungan dan sumberdaya alam- agar menghasilkan *output* lulusan yang optimal, agar dampak positif *output* pendidikan menjadi lebih nyata bagi pembangunan bangsa.

Pendidikan pascasarjana ilmu lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia telah berlangsung hampir 4 (empat) dekade. Di IPB misalnya, pendidikan pascasarjana pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan telah dimulai sejak 1975, sejak berdirinya Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, IPB. Sampai saat ini, pendidikan pascasarjana di IPB ini telah menghasilkan lebih dari 1000 lulusan S2 dan lebih dari 400 lulusan S3. Disamping itu, dewasa ini di Indonesia telah berdiri paling tidak 11 PS Pascasarjana Ilmu Lingkungan. Dengan demikian, tentunya lulusan Program Magister maupun Program Doktor telah cukup banyak.

Banyaknya lulusan tersebut sedikit banyak telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Telah cukup banyak lulusan pascasarjana ilmu lingkungan dan sumberdaya alam yang menduduki jabatan cukup penting di pemerintahan maupun swasta. Kontribusi mereka juga nampaknya cukup signifikan, mengingat banyak kebijakan yang telah dilahirkan melalui konsep-konsep yang dikembangkan, yang antara lain berbasis riset mereka selama menempuh pendidikan pascasarjana. Meskipun demikian, menghadapi tantangan kedepan, nampaknya apa yang telah dicapai tersebut perlu lebih ditingkatkan lagi. Pembangunan semakin memerlukan sumberdaya alam dan faktanya, telah melahirkan kerusakan lingkungan yang semakin

parah terjadi. Banyak isu-isu baru yang berkembang, yang menuntut agar pendidikan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam perlu *di-revitalisasi* kembali.

Pengembangan pendidikan bidang lingkungan dan sumberdaya alam perlu mengacu pada dinamika yang berkembang, baik dinamika internal universitas, dinamika nasional bahkan dinamika global. Dinamika umum yang berpengaruh dalam pelaksanaan pendidikan tinggi seharusnya menjadi landasan arah pengembangan, ditambah dengan *fakta peran spesifik ilmu lingkungan, baik dalam perannya sebagai sebuah bidang yang bersifat multi-disiplin maupun pendidikan yang bersinggungan langsung dengan sumberdaya alam dan lingkungan*. Hal yang terakhir ini memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh, dengan mengingat bahwa isu lingkungan telah menjadi wacana yang diterima secara luas: selalu dinyatakan sebagai landasan pembangunan di berbagai bidang, namun yang dalam kenyataannya belum terealisasi dengan baik, terbukti dari terjadinya berbagai pemerkosaan terhadap sumberdaya – baik yang disengaja maupun tidak-, terutama karena seringnya pertimbangan *sustainability* dikalahkan oleh pertimbangan jangka pendek. Institusi-institusi akademik di Indonesia perlu memainkan peran sebagai “*the last sentinel*” dalam berbagai isu. Pendidikan ilmu lingkungan perlu didukung oleh pusat-pusat penelitian yang kuat (utamanya Pusat Penelitian Lingkungan Hidup), semestinya menjadi bagian dari garda terdepan pembangunan nasional.

Dalam konteks Institut Pertanian Bogor misalnya, Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PS-PSL) IPB yang merupakan salah satu program studi yang bersifat *multidisiplin*, berpotensi melibatkan semua bidang keahlian di perguruan tinggi ini. Karakter *multidisiplin*, lintas Fakultas dan lintas Departemen ini menghendaki agar pengembangan program studi semacam ini mengacu pada seluruh potensi berbagai kompetensi di perguruan tinggi. Tentu saja hal ini dengan tidak meninggalkan kekhasan yang seharusnya dimiliki sebuah program studi.

TANTANGAN PENDIDIKAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan ilmu lingkungan dan sumberdaya alam, ada beberapa isu utama dan kondisi faktual yang perlu menjadi pertimbangan dan pijakan dasar dalam pengembangan program studi. Berbasis jawaban terhadap dinamika inilah pengembangan perlu dilakukan, di satu sisi untuk menghindarkan *stigma* universitas sebagai menara gading dan di sisi lain menjawab realitas tantangan kebutuhan masyarakat.

Institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian di bidang lingkungan, seyogyanya dapat memberikan dampak berupa terwujudnya tata kelola lingkungan yang berkelanjutandi. Dewasa ini, Indonesia menghadapi berbagai persoalan besar mencakup pangan, energi dan lingkungan yang saling terkait satu sama lain. Persoalan-persoalan ini secara tidak langsung menimbulkan dampak ekonomi, sosial budaya dan politik. Degradasi lingkungan dan deplesi sumberdaya alam yang tinggi terjadi karena pengabaian lingkungan.

Dunia pendidikan tinggi dewasa ini sebenarnya telah menyadari, bahwa berbagai persoalan tersebut perlu dijawab, baik melalui pendidikan, maupun penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sebagai kesatuan tridharma. Penelitian menjadi

sangat penting untuk menemukan berbagai solusi. Sebagai contoh, IPB misalnya, telah mencanangkan diri sebagai universitas berbasis riset. Hal ini tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) IPB 2008-2012 yang merupakan bagian dari Rencana Pengembangan IPB 2025, yang menyatakan bahwa visi 2008-2012 adalah "*Menjadi perguruan tinggi berbasis kelas dunia dengan kompetensi utama pertanian tropika dan biosains serta berkarakter kewirausahaan*". Visi ini tentulah harus menjadi jiwa keseluruhan gerak seluruh komponen universitas dalam pelaksanaan tugasnya. Program-program studi, termasuk program studi berbasis sumberdaya alam dan lingkungan harus menjadi cerminan pencapaian visi universitas ini. Riset yang bermutu tinggi merupakan kunci pengembangan pendidikan berbasis riset. Kedepan, fungsi program studi tidak harus cukup menerima hasil-hasil riset "*telah jadi*" dari pusat-pusat penelitian yang dilaksanakan oleh dosen sebagai bahan ajar. Manajemen program studi sendiri dapat secara proaktif menetapkan program prioritas sesuai kebutuhan pengembangan penyaluran riset mahasiswa, tanpa kemudian masuk secara langsung pada hal yang memang bukan tugas pokok sebuah program studi. *Penyaluran secara bijak* kebutuhan penelitian program studi dengan memanfaatkan hubungan saling menguntungkan antara program studi sebagai pelaksana tugas pendidikan dengan pusat penelitian sebagai pelaksana tugas penelitian dapat menjadi jawaban.

Dewasa ini *trend* persaingan semakin terasa, baik antar perguruan tinggi di dalam negeri maupun dalam hal persaingan global. Di tingkat nasional, universitas terkemuka seperti IPB dituntut untuk tetap menjadi *trend-setter* dalam pendidikan tinggi. Tentunya hal ini bukan persoalan mudah seperti di masa-masa lalu, di tengah melemahnya minat memasuki bidang pertanian akhir-akhir ini. Di tingkat global, globalisasi pendidikan tinggi mengharuskan perguruan tinggi di dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya, baik dalam hal penyelenggaraan maupun dalam hal mutu lulusan yang kedepan semestinya bertaraf internasional. Untuk konteks program pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, dengan peran yang selama ini telah dijalannya sebagai salah satu program studi terkemuka berbasis *environmental knowledge* di Indonesia, tantangan persaingan ini perlu dijawab dengan upaya yang terus menerus menyesuaikan kurikulum, *content* mata kuliah dan penelitian yang dicerminkan dalam disertasi dan tugas akhir mahasiswa yang semakin bermutu. Dalam konteks ini, hal lain yang perlu disikapi adalah semakin kaburnya batas-batas antar negara dalam kegiatan pendidikan. Hampir semua universitas terkemuka di dunia saat ini telah melakukan penyelenggaraan kerjasama antar universitas, mulai dari kerjasama penelitian, *exchange program*, sampai ke penyelenggaraan *double degree*. Sebagai gambaran, Berlin Business School menyelenggarakan *twin program* dan *double degree* dengan dengan 73 universitas lain di seluruh dunia (<http://www.fh-berlin.de/index.php?id=331&L=1>). Berbagai universitas terkemuka di dalam negeri (UI, UGM dan lain-lain), telah pula menyelenggarakan kerjasama seperti ini dengan berbagai universitas di luar negeri. Dalam konteks ini, pelaksanaan pendidikan melalui kerjasama luar negeri seperti ini perlu dimanfaatkan sebagai ajang pertukaran ilmu berbasis riser. Program-program studi lingkungan perlu menyesuaikan diri dengan membuka diri untuk berbagai kerjasama internasional di bidang penyelenggaraan pendidikan, yang pada saat ini harus diakui masih sangat terbatas dilakukan.

Arah pembangunan Indonesia khususnya di bidang ekonomi, pangan, bioenergi, kesehatan, manajemen sumberdaya alam dan lingkungan akan sangat berpengaruh bagi pengelola pendidikan tinggi. Salah satu implikasi dari moda pembangunan yang dilaksanakan pada saat ini adalah terjadinya degradasi lingkungan dan deplesi sumberdaya alam yang tinggi sebagai akibat dari pemanfaatan sumberdaya alam baik hutan, laut, lahan pertanian, mineral dan bahan tambang, air dan lain sebagainya yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan (ekologi), produksi dan sosial. Disamping kemajuan di berbagai bidang, akibat yang harus dirasakan saat ini adalah, rakyat Indonesia harus menanggung biaya sosial dan biaya lingkungan yang cukup besar, menyusul kemunduran dan degradasi sumberdaya alam yang menyebabkan alam tidak lagi mendukung pengusahaan, disamping berbagai bencana alam yang terjadi karena alam yang mulai rusak. Masalah ini bersinggungan secara langsung dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi program pendidikan ilmu lingkungan dan sumberdaya alam. Kajian pembangunan berbasis kelestarian lingkungan dengan pilar-pilar pokoknya harus semakin menjadi basis karya mahasiswa dan segenap dosen. Pendidikan sumberdaya manusia yang berkepribadian *environmental thinking* perlu menjadi isu utama pengembangan ilmu lingkungan kedepan.

Perubahan cukup signifikan yang terjadi adalah dibukanya otonomi daerah melalui UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan melalui UU Nomor 32 tahun 2004. Dalam hal pendidikan tinggi, otonomi daerah membuka peluang besar bagi perguruan tinggi untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tingginya. Salah satu peranan penting yang diharapkan dapat difasilitasi oleh perguruan tinggi adalah pengembangan kualitas sumberdaya manusia Pemerintah Daerah agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dengan berbasiskan kajian-kajian yang mendalam, akurat dan bervisi jauh kedepan sehingga percepatan pembangunan di setiap daerah dapat dilakukan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara terus menerus dalam jangka panjang. Ketidaksiapan perguruan tinggi lokal dan "kekangan" bagi perguruan tinggi yang lebih maju seperti IPB untuk tidak melaksanakan "kelas jauh" seperti disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh merupakan salah satu faktor kendala dalam pengembangan sumberdaya manusia di daerah. Kebuntuan ini perlu ditembus dengan langkah-langkah kreatif seperti pengembangan pendidikan jarak jauh yang memerlukan dukungan teknologi informasi yang memadai dan kerjasama kemitraan antar perguruan tinggi. Pendidikan ilmu lingkungan perlu menjawab tantangan ini dengan melanjutkan proses pendidikan kepada segenap *stake-holder* Pusat dan Daerah yang selama ini telah dilaksanakan, bahkan diperlukan peningkatan kualitasnya. Di satu sisi, hal ini akan menjadi sumbangsih perguruan tinggi secara nyata bagi pembangunan nasional dan daerah-daerah, di lain sisi terus menjaga "hubungan baik" dengan komponen-komponen yang terlibat langsung dalam pembangunan, agar peran dan keberdayaan perguruan tinggi dapat tetap terus dijaga. Dalam konteks ini, bahkan dalam konteks program studi, pengembangan sistem informasi yang handal akan menjadi keharusan.

Pada 2012 ini, telah disahkan menjadi UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Beberapa isu memang sampai saat ini masih menjadi kontroversi, antara lain

tentang otonomi. Konsep otonomi perguruan tinggi yang diatur UU Pendidikan Tinggi memang dikhawatirkan sejumlah fihak berpotensi melahirkan komersialisasi pendidikan. Setiap perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, diberi keleluasaan mematok plafon biaya pendidikan. Artinya, biaya masuk di lembaga tersebut boleh ditetapkan oleh perguruan tinggi. Implikasinya sangat serius karena biaya pendidikan yang sejauh ini sudah dikeluhkan mahalnya akan dapat bertambah lebih mahal. Isu lain yang tak kalah kontroversialnya ialah soal internasionalisasi. Berlakunya UU Pendidikan Tinggi menjadi tanda bagi perguruan tinggi asing untuk beroperasi secara resmi di Indonesia, meskipun ada syarat yang harus dipenuhi, yakni akreditasi di negeri asal dan kewajiban bekerja sama dengan lembaga pendidikan di dalam negeri, namun tetap saja itu tidak mampu mempus kekhawatiran bahwa kehadiran kampus asing itu akan mengancam eksistensi perguruan tinggi domestik.

Meskipun demikian, dalam merespons UU ini, perguruan tinggi besar perlu mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam waktu yang lebih cepat, tidak terganggu oleh persoalan-persoalan birokrasi. Hal ini dapat menjadi faktor pendorong agar perguruan tinggi lebih berkreasi mencari terobosan-terobosan baru agar dapat mengembangkan diri secara lebih berkualitas dan memiliki daya saing pada tingkat nasional, regional maupun global, yang tentunya harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Menyikapi hal ini, PS PSL perlu terus menjaga dirinya, agar eksistensi PS dapat terus dijaga, bahkan perlu menciptakan kondisi menjadi sebuah PS yang *"mutlak harus ada"*. Penyempurnaan kurikulum, pendefinisian ranah keilmuan secara lebih *exact* merupakan tuntutan yang mau tidak mau harus dijawab.

Optimalisasi peran universitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif, bermutu dan kompeten serta penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks nasional ini pula, semestinya, perguruan tinggi terkemuka perlu memposisikan diri sebagai institusi penghela kemajuan bangsa jauh ke depan, dan tidak terperangkap pada aspek solusi yang parsial dan jangka pendek. Di IPB, tidak dapat disangkal, peran PS Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan sejauh ini cukup besar dalam menjaga peran IPB di tingkat nasional ini, namun tantangan persaingan kedepan yang akan semakin ketat perlu dijawab dengan berbagai peningkatan, utamanya relevansi pendidikan dengan kebutuhan riil pembangunan.

- **Optimalisasi Penyelenggaraan Tridharma IPB.** Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi perlu terus dilakukan. Dalam hal program studi, hal ini mengharuskan pengelolaan kegiatan akademik dan manajemen selalu mengacu pada *operational excellent* yaitu pemanfaatan investasi sumber daya dan sistem pengelolaannya yang transparan dan akuntabel.

PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI MENJAWAB TANTANGAN

Dalam menjawab tantangan sebagaimana diuraikan di atas, sejumlah langkah tentu diperlukan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan mencakup baik pemantapan

landasan filosofis yang menjaga arah pengembangan program studi kedepan maupun langkah praktikal untuk pengembangan PS agar secara berlangsung semakin maju kedepan.

Sesuai dengan fungsinya sebagai pelaksana pendidikan, apalagi sebagai ujung tombak institusi pendidikan, hal mendasar yang perlu selalu melakukan *penguatan mutu pendidikan*. Hal ini perlu dimulai sejak dari prosesnya, sehingga pada akhirnya tujuan akhir menghasilkan mahasiswa yang unggul dapat dicapai. Beberapa hal penting yang perlu dilaksanakan diuraikan dibawah ini.

- **Penajaman Kurikulum Secara Kontinyu.** Sebuah kurikulum pada hakikatnya disusun sesuai dengan kebutuhan di satu sisi, dan sesuai dengan perkembangan pengetahuan di sisi lain. Dengan perkembangan kebutuhan dan perkembangan keilmuan yang terjadi terus menerus, evaluasi dan penajaman kurikulum perlu senantiasa dilakukan secara reguler. Hal ini dapat dilaksanakan dengan suatu lokakarya akademik yang dilakukan secara reguler.
- **Menjawab Kebutuhan melalui Bidang Minat.** Pendidikan pada hakikatnya adalah menjawab isu yang relevan yang berkembang di masyarakat, baik pada tingkat lokal, nasional maupun global. Salah satu cara untuk melihat pencapaian berdasarkan kompetensi dapat dilihat dari bidang-bidang minat ini. Sebagai contoh di PSL IPB, jika disertasi Doktor dikelompokkan berdasarkan bidang minat (BM)-nya, maka ternyata terlihat bahwa mayoritas mahasiswa Program Doktor PS-PSL IPB (109 disertasi dalam 5 tahun terakhir atau 67%) merupakan disertasi dalam **bidang minat Kebijakan dan Manajemen Lingkungan**. Mahasiswa yang mendalami BM **Pengelolaan Pencemaran Lingkungan** ada sebanyak 38 mahasiswa (23%), sedangkan mereka yang mendalami **Keanekaragaman Hayati dan Ekowisata** ada sebanyak 15 mahasiswa (10%). Jika dilihat dari aspek ini, maka paling tidak kompetensi di ketiga bidang minat tersebut telah terisi semua. Adapun banyak dan sedikitnya pencapaian di masing-masing ketiga bidang minat tentunya relatif. Kedepan, dispersi diantara bidang-bidang minat ini perlu dijaga.
- **Menjawab isu lingkungan Global.** Pendidikan maupun penelitian perlu merespons terhadap perkembangan yang ada. Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan ("Rio+20") telah menyepakati dokumen "**The Future We Want**" yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini memuat kesepahaman pandangan terhadap masa depan yang diharapkan oleh dunia (*common vision*) dan penguatan komitmen untuk menuju pembangunan berkelanjutan (*renewing political commitment*). Harapan masa depan tersebut dibingkai oleh kesepakatan dalam elemen *Green Economy in the context of sustainable development and poverty eradication*, pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan termasuk penguatan pilar lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan (*Institutional Framework for Sustainable Development*), dan kerangka aksi bagi pelaksanaan dan sarana serta instrumen bagi pelaksanaan (*Framework for Action and Means of Implementation*). Dalam konteks ini, pendidikan lingkungan perlu menjawabnya melalui penyesuaian content matakuliah secara berkesinambungan.

- **Perbaikan Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Efektif.** Perbaikan bahan ajar dan metode pembelajaran efektif perlu terus didorong dan dikembangkan. Salah satu cara efektif untuk ini adalah melalui raihan program berbasis hibah kompetitif. Dorongan kepada *stake-holder* PS dalam berbagai usulan kompetitif perlu dikedepankan. Tindakan praktikal semacam pemberian reward untuk bahan ajar yang bagus, atau inovasi dalam pengembangan metoda pembelajaran misalnya, perlu diterapkan dalam pengelolaan PS.
- **Peningkatan Kerjasama Pendidikan.** Kerjasama dengan institusi mitra dalam penyelenggaraan pendidikan semisal kegiatan praktek kerja, penelitian mahasiswa dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendekatkan mahasiswa dengan wahana penerapan keilmuan dan dunia kerja perlu terus dibina dan dikembangkan cakupannya. Penjajagan kerjasama juga perlu dilakukan kedepan, dengan universitas lain di dalam dan luar negeri, misalnya dalam bentuk *double degree* yang relatif belum ada, atau pengembangan kerjasama penelitian yang selama ini telah banyak dilakukan.
- **Penerapan Sistem Jaminan Mutu.** Sistem jaminan mutu spesifik Program Studi perlu dikembangkan dan diterapkan untuk menjamin pelaksanaan pendidikan yang *excellent*. Dalam hal jaminan mutu pendidikan, hal ini antara lain dapat dilakukan dengan pengembangan dan penerapan manual mutu termasuk berbagai Prosedur Operasional Baku (POB).
- **Peningkatan Infrastruktur Pendidikan yang Berkualitas.** Infrastruktur pendidikan yang berkualitas perlu dijamin keberadaannya untuk menjamin pendidikan berlangsung efektif. Termasuk dalam hal ini adalah ruang kelas, laboratorium, *pilot plant*, perpustakaan⁹, teknologi informasi, dan fasilitas lain
- **Peningkatan Administrasi Pendidikan.** Sistem administrasi pendidikan yang baik senantiasa harus mengikuti perkembangan kemajuan sistem dan *tools* untuk menjamin akuntabilitas dalam proses pendidikan dan kecepatan jawaban administratif terhadap kebutuhan pelayanan pendidikan
- **Peningkatan Layanan Kemahasiswaan.** Dalam sebuah institusi pendidikan, mahasiswa berperan ganda sebagai obyek terdidik sekaligus subyek bagi keberlangsungan pendidikan. Kemajuan sebuah institusi pendidikan sangat ditentukan oleh layanan kemahasiswaan yang baik, yang mampu memenuhi kebutuhan peserta didik.
- **Keseimbangan Antar Layanan Pendidikan.** Dewasa ini, berkembang pula layanan pendidikan “*eksekutif*”. Dalam konteks ini, program studi perlu menjaga keseimbangan antar layanan reguler dan eksekutif. Adalah wajar bahwa kepada layanan eksekutif diberikan fasilitas tertentu yang mencerminkan sifat eksekutifnya, namun jangan sampai hal ini kemudian menyebabkan layanan reguler di nomor duakan dengan mengingat fungsi institusi pendidikan publik. Hal lain yang perlu dijaga terus menerus adalah

⁹ Dalam hal bahan pustaka, pustaka yang *up-to-date* merupakan kebutuhan mutlak pendidikan Pascasarjana dan sebuah universitas berbasis riset. Mimpi untuk mendapatkan layanan pustaka *on-line* semacam *Science Direct* yang biasa dimiliki universitas besar di luar negeri sampai saat ini belum terealisasi di IPB, terbentur masalah anggaran.

jaminan bahwa penjaminan mutu senantiasa diberlakukan terhadap kedua layanan ini. Hal ini terlebih perlu diperhatikan bagi program eksekutif, mengingat fakta bahwa dalam hal ini program studi banyak berhubungan dengan *mahasiswa sibuk*, atau mahasiswa yang juga berperan menjadi pemegang otoritas publik.

- **Peningkatan Promosi Pendidikan.** Efektifitas promosi yang berdampak pada peningkatan peminat/pendaftar ditentukan oleh banyak faktor, khususnya kualitas promosi dan intensitas promosi. Besarnya biaya promosi harus disiasati dengan pemilihan strategi promosi yang 'cost-effective'. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kepada mahasiswa merupakan salah satu media promosi yang sangat baik, bukan hanya promosi melalui media massa, penyebaran *promotion kit* (leaflet, dll) maupun *roadshow* ke berbagai daerah dan sekolah. Oleh karena itu promosi perlu terus dikembangkan dengan tujuan untuk: (i) meningkatkan jumlah peminat (ii) meningkatkan kualitas peminat pendidikan dan (iii) meningkatkan proporsi perolehan mahasiswa program pascasarjana secara lebih tinggi sebagai salah satu indikator ke arah universitas riset.

PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok yang perlu disampaikan sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan program studi sumberdaya alam dan lingkungan. Tulisan ini disajikan dalam rangka Seminar Nasional Krisis Lingkungan Hidup di Indonesia sebagai bagian dari upaya penguatan pendidikan pascasarjana Ilmu Lingkungan. Harapannya, pengembangan pendidikan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan kedepan benar-benar dapat menjawab kebutuhan bangsa dalam menjaga sumberdaya alam dan lingkungan di era pembangunan berbagai bidang dewasa ini.